

Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan
Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

ABSTRAK

Pedofila adalah bentuk dari rusaknya generasi penerus bangsa, akibat dari kelainan atau penyimpangan seksual manusia yang timbul dikalangan masyarakat, dengan hasrat nafsu seksual yang tertuju pada anak - anak dibawah usia 14 tahun. Perihal pelecehan seksual adalah suatu tindakan dari pelaku (pedofil), baik secara verbal maupun non, dimana korban anak – anak dipergunakan sebagai stimulasi seksual bagi pelaku, termasuk melakukan, menunjukkan, membuat, atau melakukan kontak fisik hingga adegan yang berkaitan dengan pornografi pada anak – anak.

Saat ini lingkaran pedofilia di Indonesia meningkat cukup banyak, bahkan berbanding berbalik dengan perlindungan anak yang minim. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum berstatus baik, hal ini terjadi lantaran perlindungan yang terjadi saat ini lebih menitik beratkan segi hukuman pada pihak pelaku, dan cenderung mengabaikan segi psikologis korban. Akibatnya dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual juga bisa sangat ekstrim.

Demikian hal ini berkaitan dengan bagaimana cara melindungi generasi baru yang “sehat” secara fisik maupun psikis, disamping itu bertujuan untuk meninjau dan menganalisis ketidakcocokan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak – anak korban para pedofil di Indonesia yang tentunya tetap memperhatikan prospektif nilai keadilan perlindungan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Teknik Analisa bahan hukum berupa preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga data yang dikumpulkan berdasar peraturan perundang – undangan yang berlaku, lebih jauh valid.

Atas hal tersebut sanksi atas pelecehan seksual diatur secara spesifik dalam bahan – bahan hukum terkait yang dikumpulkan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder akan diolah dengan cara membandingkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, khususnya pembahasan tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Anak.

Melalui Undang – undang Nomor 23 tahun 2002, dan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam pasal- pasal tersebut, sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda pada pelaku pelecehan, namun kedua Undang – Undang tersebut belum terlalu kuat untuk memenuhi unsur

eksekusi efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak – anak, maka penulis menyertakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia sebagai tinjauan unsur tambahan dalam segi pemenuhan perlindungan anak dan sanksi yang menimbulkan efekjera bagi pelaku.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Seksual, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Pedophilia is a form of damage to the nation's next generation, as a result of human sexual abnormalities or deviations that arise among the community, with sexual desires witnessed in children under the age of 14. Regarding sexually insulting, it is an act of the perpetrator (pedophile), both verbally and non-verbally, where the child victim is used as sexual stimulation for the perpetrator, including doing, showing, making, or making physical contact to scenes related to child pornography.

At present the circle of pedophiles in Indonesia has increased quite a lot, even inversely proportional to the minimal protection of children. The implementation of legal protection for child victims of pedophilia in Indonesia is still not in good status, this is because the current protection focuses more on punishment the perpetrators, and tend to ignore the psychological aspects of the victims. The impact caused when a child becomes a victim of sexual abuse can also be very extreme.

Thus this relates to how to protect the new generation who are "healthy" physically and psychologically, besides that it aims to review and analyze the incompatibility of the implementation of legal protection for child victims of pedophiles in Indonesia which of course still pays attention to the perspective of the value of justice in applicable legal protection.

This study uses a normative juridical approach. The legal material analysis technique is in the form of prescriptive, namely to provide arguments on the results of the research that has been carried out, so that the data collected is based on applicable laws and regulations, more valid.

In this regard, sanctions for sexual concessions are specifically regulated in related legal materials collected from primary and secondary legal sources. Efforts will be made to compare one legal material with other legal materials, in particular the discussion on Children as Victims of Sexual Crimes under the Law. Child protection laws.

Through Law Number 23 of 2002, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In these articles, the sanctions given are in the form of imprisonment and fines for the perpetrators of crimes, but these two laws are not strong enough to fulfill the element of executing a deterrent effect for perpetrators of sexual abuse of children, so the authors include Law No. 17 of 2014 and Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Chemical Castration as additional reform elements in terms of fulfilling child protection and sanctions that create a deterrent effect for perpetrators.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Crimes, Child Protection.